

Inovasi Kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG)

Fauziatul Ifa¹, Luthfi Sabda Sahdana²

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Info Artikel

Article history:

Received Sep, 2025

Revised Sep, 2025

Accepted Sep, 2025

Kata Kunci:

Best practice, Dampak, Keberlanjutan, Kemitraan, Kepemimpinan

Keywords:

Best practice, Impact, Leadership, Partnerships, Sustainability

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *best practice* dan menganalisis keberhasilan Inovasi Kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan seminar dan studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Kriteria dari teori Prasojo, yang digunakan untuk mengukur keberhasilan inovasi adalah dampak, kerja sama, keberlanjutan, dan kepemimpinan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dampak inovasi dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam kebijakan pemerintah dan praktik sektor swasta dan dapat meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan dan akses layanan keuangan. Adanya Kerja sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga, jasa keuangan (bank), layanan keuangan (nonbank), perusahaan *fintech*, dan lembaga keuangan Islam. DNTG akan terus berlanjut dan diperbaharui secara berkala sehingga dapat dijadikan referensi oleh berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen untuk memberikan peluang besar terhadap akses keuangan formal bagi perempuan, selain untuk pengarusutamaan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe best practices and analyze the success of Financial Inclusion Policy Innovation through the Compilation of Gender Disaggregated National Data (DNTG). The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used seminars and literature studies. The types of data collected are primary data and secondary data. The criteria from Prasojo's theory, used to measure the success of innovation are impact, cooperation, sustainability, and leadership. The results of this study found that the impact of innovation can provide useful information in government policies and private sector practices and can improve financial literacy for women and access to financial services. Cooperation and coordination between ministries/institutions, financial services (banks), financial services (non-banks), fintech companies, and Islamic financial institutions. The DNTG will continue and be updated regularly so that it can be used as a reference by various stakeholders. The Coordinating Ministry for Economic Affairs continues to be committed to providing great opportunities for access to formal finance for women, in addition to gender mainstreaming in the medium-term development plan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Fauziatul Ifa

Institution: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Email: fauziatulifa4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

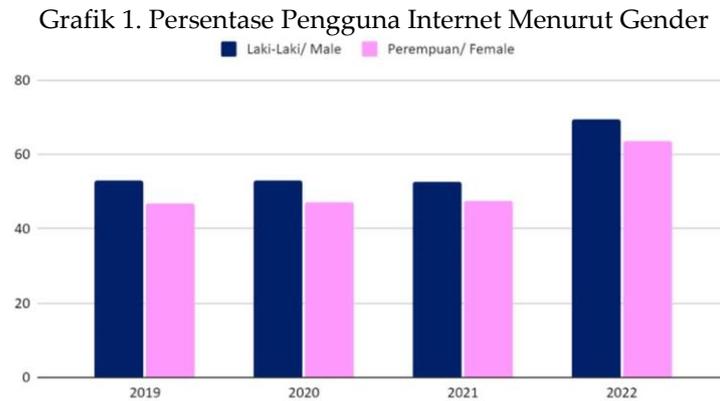
Inovasi kebijakan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang mempengaruhi proses inovasi. Pendekatan sistem inovasi telah diterima dan disebarluaskan secara luas di kalangan peneliti dan pembuat kebijakan sejak awal sekitar tahun 1990. Pendekatan ini menekankan faktor-faktor sisi permintaan terhadap suatu produk baru yang mempengaruhi proses inovasi (Edquist, 2015). Definisi inovasi menurut Rogers yaitu sebagai sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh suatu kelompok atau unit adopsi lainnya.

Penelitian Rogers mendefinisikan lima karakteristik inovasi yang dapat menjelaskan tingkat adopsi yang berbeda-beda dalam setiap individu. Pertama adalah keuntungan relatif didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah inovasi dianggap lebih baik dibandingkan inovasi sebelumnya. Kedua adalah kompatibilitas yang didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan masyarakat. Ketiga adalah kompleksitas yang didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Keempat adalah *trialability*, didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba dengan skala terbatas. Kelima adalah observabilitas, yang didefinisikan sebagai tingkat di mana hasil dari suatu inovasi terlihat oleh orang lain. Rogers, 1995 dalam (Akers & Grafton, 2006). Inovasi harus dilakukan secara simultan dan terintegratif serta memerlukan perhatian yang serius seiring tuntutan inovasi dalam organisasi publik baik pemerintah pusat maupun daerah (Sururi, 2017). Kemajuan teknologi dan digitalisasi industri 4.0 yang juga disebut sebagai revolusi industri keempat, telah meningkatkan penggunaan *fintech* di sektor jasa keuangan (Mpofu, 2024). Adopsi *fintech* dan inklusi keuangan memiliki efek positif yang kuat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Horobet et al., 2025). Peran kepercayaan, kualitas layanan, dirasa sangat penting dalam pemanfaatan layanan *fintech*. Literasi keuangan digital sebagai mediator antara penggunaan *fintech* dan inklusi keuangan (Amnas et al., 2024).

Inklusi keuangan merupakan penyediaan layanan keuangan yang tepat efektif dengan kebutuhan keuangan dengan biaya terjangkau berdasarkan persyaratan kesempatan, yang sama dan prinsip keberlanjutan bisnis, memperkuat pembangunan sistem keuangan dan meningkatkan infrastruktur keuangan untuk semua sektor masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan, kelompok khusus penduduk perdesaan, serta usaha kecil dan mikro yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan yang ada (Li et al., 2023). Ketimpangan gender memberikan pengaruh yang sangat merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada penekanan yang berkembang pada inklusi keuangan oleh pemerintah baik bank sentral di seluruh dunia didorong untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan gender. Untuk mengurangi kesenjangan gender diperlukan promosi program literasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, merancang instrumen keuangan digital yang menjawab kebutuhan khusus gender, dan advokasi kebijakan yang mempersempit kesenjangan gender digital (Le Quoc, 2024).

Gambaran demografis di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warna negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Menurut hasil susenas 2024, jumlah penduduk di Indonesia pertengahan tahun sekitar 281.603.800, diperkirakan jumlah pemuda sebesar 64,22 juta atau seperlima dari penduduk Indonesia. Pemuda perempuan lebih sedikit dari pada pemuda laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 102, 44, yaitu terdapat 100 pemuda perempuan pada setiap 102 pemuda laki-laki.

Pada abad ke-21, kemajuan teknologi informasi dan munculnya internet telah menciptakan ekosistem informasi dan media baru, mendorong masyarakat menuju konektivitas jaringan yang lebih besar (Jia et al., 2024). Data penggunaan internet tahun 2019-2022 di Indonesia menunjukkan tren yang relatif stabil pada tahun 2019 hingga 2021, diikuti peningkatan signifikan pada tahun 2022. Berikut grafiknya:



Source: Badan Pusat Statistik (BPS)

Penggunaan internet di kalangan laki-laki mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 53,13% turun menjadi 52,5 % pada tahun 2021, kemudian naik lagi pada tahun 2022 sebesar 69,36 %.

Sementara itu pada kalangan perempuan, penggunaan internet menunjukkan peningkatan konsisten, dari tahun 2019 sebesar 46,87 % melonjak pada tahun 2022 sebesar 63,53%. Tren peningkatan pada kalangan perempuan tersebut menunjukkan potensi positif terhadap inklusi keuangan, karena dengan akses internet yang meluas akan memberikan peluang dalam mengakses layanan keuangan digital dan informasi finansial. Meskipun kalangan perempuan mengalami peningkatan, namun masih ada kesenjangan gender, yaitu pengguna internet di kalangan laki-laki masih lebih banyak. Guna untuk mendukung inklusi keuangan yang merata, diperlukan peningkatan akses dan adopsi teknologi digital di kalangan perempuan.

Capaian keuangan inklusi di Indonesia hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2023 tingkat kepemilikan akun mencapai 76 % melampaui target yang telah ditetapkan dengan peningkatan sebesar 27,7 %. Di sisi penggunaan akun mencapai 88 % juga melampaui target dengan peningkatan sebesar 20,9 %. Yang digambarkan pada grafik berikut.

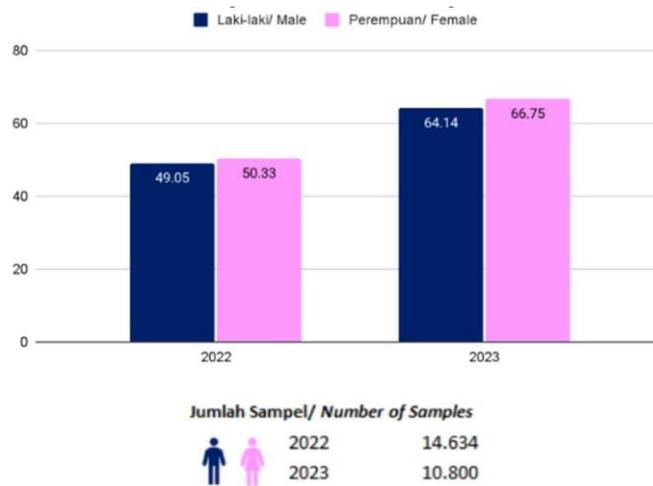
Grafik 2. Tingkat Kepemilikan Akun Keuangan



Source: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data literasi keuangan dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan substansial baik untuk laki-laki maupun perempuan berdasarkan SNLIK 2022 dan SNLIK 2023. Peningkatan sekitar 15 % dalam satu tahun merupakan pencapaian yang baik. Hal yang menarik, Perempuan menunjukkan tingkat literasi keuangan yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, dengan gap sekitar 1,3 % di tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 2,6 %.

Grafik 3. Tingkat Literasi Keuangan



Source: SNLIK, 2022 dan 2023

Peningkatan literasi keuangan menunjukkan keberhasilan berbagai program edukasi keuangan kepada masyarakat yang diimplementasikan melalui SNKI dan SNKIP. Keunggulan Perempuan dalam aspek ini merupakan hal yang penting yang dapat digunakan untuk Menyusun strategi dalam peningkatan inklusi keuangan yang lebih efektif. Namun indeks literasi keuangan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan standar global (Leviastuti et al., 2023).

Pada data susenas 2023 masih terdapat kesenjangan gender. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan penggunaan produk keuangan, maka inklusi keuangan melengkapi kesetaraan gender dengan mengoreksi kekurangan finansial penduduk, termasuk perempuan. Hal ini akses keuangan dapat memberikan perempuan memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan sehingga menguntungkan bagi peningkatan partisipasi ekonomi kelompok yang terpinggirkan khususnya perempuan. Sistem keuangan inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung (Wani et al., 2024). Hal ini menekankan pentingnya kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok tersebut. Program yang telah dilaksanakan pemerintah untuk memperluas akses Masyarakat terhadap layanan keuangan formal antara lain melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk siswa dan santri, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), serta berbagai pembiayaan bersubsidi yang ditujukan bagi pelaku UMKM, seperti pembiayaan ultra mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan *best practice* dan menganalisis keberhasilan Inovasi Kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG). Data Nasional Terpilah Gender merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan inklusi keuangan yang berkualitas dan berbasis data untuk mendukung perumusan kebijakan. Dengan adanya data nasional terpilah gender maka menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat terjangkau terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Kriteria yang digunakan untuk mengukur Inovasi Kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan DNTG adalah menggunakan kriteria, 1) Dampak, sebuah kebijakan yang berhasil harus menunjukkan dampak positif bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lainnya; 2) Kerja sama, praktik kebijakan yang baik seharusnya berlandaskan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan dengan minimal dua entitas yang saling bergantung; 3) Keberlanjutan, pelaksanaan kebijakan yang baik harusnya membawa perubahan yang mendasar di bidang legislasi, kebijakan sosial, kerangka kerja kelembagaan, serta efisiensi, transparansi, dan manajemen; 4) kepemimpinan, pelaksanaan kebijakan yang baik harus didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi untuk keberhasilan tujuan kebijakan (Prasojo et al., 2007).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Inovasi Kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG).

a. *Digital Financial Inclusion, Financial Efficiency, and Green Innovation*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak dan mekanisme inklusi keuangan digital pada inovasi hijau dengan menggunakan data panel Provinsi Tiongkok dari Tahun 2011 hingga 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap inovasi hijau. Hasil analisis efek perantara menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital dapat mempromosikan inovasi hijau dengan mengurangi alokasi modal dan meningkatkan efisiensi keuangan [7].

b. *Digital Inclusive Finance, R&D Investment, and Green Technology Innovation Nexus*

Inovasi teknologi hijau merupakan efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang bermutu tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara lokal teknologi hijau dan inklusi keuangan digital. Infrastruktur informasi perlu dikuatkan terutama di area yang masih terdapat kesenjangan. Peningkatan investasi dalam penelitian ini dan pengembangan R&D secara tidak langsung mendukung inovasi teknologi hijau regional (H. Sun et al., 2024).

c. *The Nexus Between Economic Growth, Financial Development, Financial Inclusion and Financial Innovation In Africa*

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan keuangan, inklusi keuangan, dan inovasi keuangan di Afrika dengan menggunakan *autoregresi vector* struktural panel menggunakan data tahunan dari tahun 2004 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger model koreksi kesalahan vektor untuk menguji kausalitas terarah dengan inklusi keuangan, inovasi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai variabel dependen, dan koefisien istilah koreksi kesalahan (ECT) signifikan negatif pada satu persen untuk kausalitas jangka panjang. Para pembuat kebijakan dan pemerintah harus mempertimbangkan setiap aspek inklusi keuangan karena keduanya tidak hanya mempengaruhi satu sama lain tetapi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi, oleh karena itu kebijakan fiskal mampu mengarahkan lebih banyak inklusi keuangan, inovasi keuangan, dan pengembangan keuangan (Otekinrin et al., 2021).

d. *Digital Financial Inclusion to Corporation Value: The Mediating Effect of Ambidextrous Innovation*

Menurut pendekatan dan kebaruannya, inovasi perusahaan dapat dibagi menjadi inovasi eksploitatif dan inovasi eksploratif, yaitu inovasi *ambidextrous*. Didefinisikan sebagai tindakan promosi inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital, inklusi keuangan digital membawa peluang baru untuk implementasi proyek inovasi perusahaan dan peningkatan nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam UKM: (1) inklusi keuangan digital memiliki dampak positif yang signifikan pada inovasi eksploitatif, tetapi memiliki dampak positif yang signifikan pada inovasi eksploratif, tetapi memiliki efek yang lebih kecil pada inovasi eksploratif dengan jeda waktu; (2) Inovasi *ambidextrous* memainkan peran perantara parsial dalam efek inklusi digital pada nilai perusahaan; (3) fleksibilitas keuangan memoderasi hubungan antara inklusi keuangan digital dan nilai perusahaan secara positif; (4) persaingan pasar produk memoderasi hubungan antar inklusi keuangan digital dan inovasi eksploratif secara positif (Yang et al., 2022).

e. *Digital Financial Inclusion and Innovation of MSMEs*

Layanan keuangan inklusif digital merupakan jenis layanan keuangan baru yang sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah serta mendorong perkembangannya. Keuangan inklusif digital memiliki efek peningkatan pada inovasi teknologi, tetapi dukungan untuk perusahaan berteknologi tinggi

masih belum memadai. Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efek regional inklusi keuangan digital, wilayah tengah dan barat dibandingkan dengan wilayah timur memiliki kinerja keuangan inklusif digital yang lebih baik untuk mendorong inovasi perusahaan (J. Sun & Zhang, 2024).

f. ***Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)***

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang *best practice* dan inovasi terkait dengan Kebijakan Neraca Komoditas Beras. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *best practice* oleh prasojo 2007. Beberapa hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan kebijakan yang dinilai dari dampak sistem tata niaga yang tertata dan terintegrasi, manfaat inovasi juga didapatkan oleh pemerintah, produsen, pelaku usaha, dan masyarakat, serta komitmen pimpinan yang cukup tinggi dari berbagai Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ifa & Darmawan, 2025).

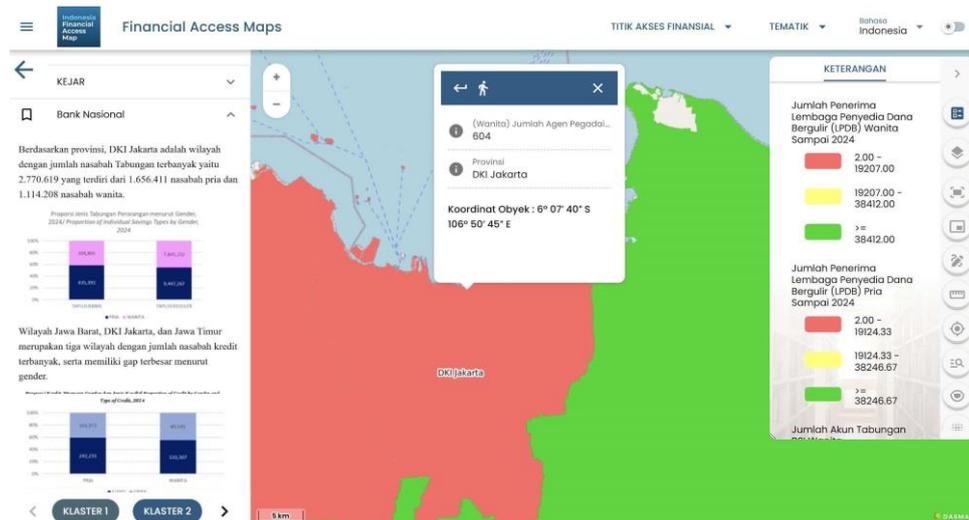
3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen yang utama. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan fenomena yang ditangkap peneliti dan menunjukkan buktinya (Abdussamad, 2022). Metode penelitian tersebut digunakan dalam penelitian ini tidak hanya sekadar pada pengumpulan data saja tetapi juga menganalisis data mengenai inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG). Teknik pengumpulan data menggunakan seminar dan studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dari pendapat para narasumber dan data sekunder berupa laporan publikasi, dan informasi yang diakses yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Melalui studi literatur akan mendapat informasi dan data yang dapat menjawab pokok bahasan dalam penelitian terkait Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender adalah sebagai strategi nasional dalam merespons tantangan tingkat global dalam pengarusutamaan perempuan dalam mempromosikan akses keuangan yang mudah dan luas. Pada dasarnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs mengatasi tantangan universal yang berdampak pada negara-negara termasuk ketidaksetaraan, kemiskinan, degradasi lingkungan, produktivitas, perubahan iklim, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian (Almuaythir et al., 2024). Selain itu untuk memastikan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional dalam pengumpulan data dan kesetaraan gender. Kemudian untuk memberikan dasar memahami kebutuhan konsumen, mengidentifikasi tantangan dan memberikan dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pembangunan yang berlandaskan gender dimulai dengan pengumpulan data dan analisis peka gender dapat menghasilkan kebijakan dan respons program yang tepat (Nandy, n.d.).

Data Nasional Terpilah Gender terintegrasi dengan Aplikasi Financial Access Maps (FAM) untuk membantu pengguna mendapat *insight*. Pemanfaatan FAM *geoportal* adalah sebagai platform pertemuan sisi *supply* dan *demand* lembaga jasa keuangan, menjadi *database* terpusat untuk kegiatan dewan nasional keuangan inklusif (DNKI), mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan, *dashboard* data spasial maupun tabular interaktif, dan integrasi dengan data dari kementerian/lembaga lain maupun data dari daerah. Berikut gambar visualisasi data terkait terpilah gender pada klaster 2 terkait jumlah kepemilikan tabungan:



Gambar 1. Visualisasi data terpilah gender terkait jumlah kepemilikan tabungan

Pengumpulan DNTG terdiri dari lima klaster utama yaitu: kementerian dan lembaga pemerintah, bank, non-bank, perusahaan teknologi jasa keuangan, dan keuangan syariah. Temuan dari klaster kementerian Lembaga di kalangan pemuda laki-laki ungu dalam literasi digital (penggunaan internet 69,36 % vs 63,53 %) sementara perempuan menunjukkan keunggulan dalam literasi keuangan (66,8 % vs 64,1 %) dan kepemilikan rekening di kelompok usia muda. Pada klaster Bank, data dari bank BNI menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi kepemilikan kredit dengan persentase 67 % sedangkan perempuan sebesar 33 %, sementara untuk tabungan di Bank Jateng data menunjukkan bahwa perempuan mendominasi produk tabungan SIMPEL dengan persentase 63 % dibandingkan laki-laki 37 %. Hal ini terdapat kesenjangan bahwa laki-laki mendominasi kredit produktif dan konsumtif.

Pada klaster Lembaga keuangan non-bank menunjukkan bahwa perempuan mendominasi layanan pegadaian sebagai nasabah dengan persentase 60 %, sementara laki-laki mendominasi program ULaMM (unit layanan modal mikro) dari PNM dengan persentase 57 %. Karakteristik akses berdasarkan DNTG bahwa perempuan dominan di sektor perdagangan, laki-laki dominan di sektor pertanian dan produksi. Terdapat kesenjangan distribusi berbasis gender dalam tujuan pinjaman menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi berbeda dalam menggunakan pinjaman. Data menunjukkan laki-laki lebih dominan meminjam untuk tujuan Pendidikan, perumahan, pertanian, kendaraan, dan Kesehatan, sementara perempuan lebih cenderung meminjam untuk pariwisata dan pinjaman berbasis simpanan. Pada klaster inovasi teknologi dan sektor keuangan belum adanya data terpilah gender untuk sektor ini. Pada klaster keuangan syariah, data DNTG menunjukkan dominasi perempuan dalam produk tabungan emas (55 % dari total akun) dan produk gadai syariah RAHN (59 % dari total akun), menggambarkan preferensi perempuan yang lebih kuat terhadap instrumen keuangan berbasis aset fisik dan syariah.

Kriteria-kriteria yang dijadikan alat ukur dalam menentukan keberhasilan pada penelitian Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) adalah dampak (Impact), kemitraan (partnership), keberlanjutan (sustainability), kepemimpinan (leadership):

Dampak dalam Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan DNTG adalah dapat memberikan informasi kebijakan pemerintah dan praktik sektor swasta, mendorong penciptaan solusi yang ditargetkan bagi perempuan, dapat memastikan bahwa perempuan dapat sepenuhnya berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari sistem keuangan formal yang setara, dan dapat meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan dan akses layanan keuangan. Dalam promosi literasi keuangan berbagai organisasi nasional dan internasional terus menerus terlibat. Negara-negara OECD menciptakan jaringan internasional tentang edukasi keuangan (INFE) dengan beranggotakan 130 negara termasuk Indonesia (Bansal & Kaur, 2024). Menurut pendapat Bapak

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, “Dengan adanya *national gender disaggregated* data maka menjadi semakin penting memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menjangkau seluruh lapisan Masyarakat”. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan, pada studi di negara Amerika Serikat mereka tidak mengizinkan penegasan gender secara hukum dalam dokumen resmi, yang mungkin akan memiliki implikasi yang sangat besar pada keuangan (Kuznicka-Blaszowska & Jablonski, 2024). Pada sisi lain terdapat negara-negara bagian AS yang mengumpulkan data jenis kelamin dan gender pada formulir resmi pemerintah untuk memahami, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengawasi populasi (Waldman, 2024). Jadi hal yang perlu dipelajari adalah menjaga DNTG agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Kemitraan (*partnership*) dalam Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) adalah Kerja sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga, jasa keuangan (*bank*), layanan keuangan (*non-bank*), perusahaan *fintech*, dan Lembaga keuangan Islam dalam penyusunan Data Nasional Terpilah Gender. Pembuatan statistik gender merupakan proses yang kompleks sehingga memerlukan keterlibatan berbagai aktor dari Kementerian/Lembaga terkait (Richards et al., 2022). DNTG merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) dan diperkuat dengan Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKIP) dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB) (BPK RI, 2020).

Keberlanjutan (*suitanability*) Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Penyusunan DNTG adalah akan terus berlanjut dan diperbaharui secara berkala sehingga dapat dijadikan referensi oleh berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi pemerintah dalam perumusan dan pembuatan kebijakan tetapi juga penyedia jasa keuangan, akademisi, dan peneliti untuk mendukung inklusivitas keuangan yang lebih luas, terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Data gender dapat dimanfaatkan untuk membuat Keputusan, jenis kelamin dan gender telah menjadi titik data dalam algoritma kompleks (Waldman, 2023).

Kepemimpinan (*leadership*) dalam Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) adalah pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen untuk memberikan peluang besar terhadap akses keuangan formal bagi perempuan, selain untuk pengarusutamaan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah. ADB juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan dengan harapan DNTG dapat menjadi rujukan berharga bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam akses keuangan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini ditemukan bahwa Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dampak inovasi dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam kebijakan pemerintah dan praktik sektor swasta dan dapat meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan dan akses layanan keuangan. Adanya Kerja sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga, jasa keuangan (*bank*), layanan keuangan (*non-bank*), perusahaan *fintech*, dan lembaga keuangan Islam. DNTG akan terus berlanjut dan diperbaharui secara berkala sehingga dapat dijadikan referensi oleh berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen untuk memberikan peluang besar terhadap akses keuangan formal bagi perempuan, selain untuk pengarusutamaan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis berterima kasih kepada Dewan Nasional Keuangan Inklusi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menyediakan informasi mengenai Inovasi kebijakan Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *OSF Preprints*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Akers, E. J., & Grafton, C. (2006). *A study of the adoption of digital government technology as public policy innovation in the American states*. ProQuest. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/study-adoption-digital-government-technologyas/docview/305360820/se-2?accountid=63730>
- Almuaythir, S., Singh, A. K., Alhusban, M., & Daoud, A. O. (2024). Robotics technology: catalyst for sustainable development—impact on innovation, healthcare, inequality, and economic growth. *Discover Sustainability*, 5(1), 486. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00744-y>
- Amnas, M. B., Selvam, M., & Parayitam, S. (2024). *Fintech* and financial inclusion: Exploring the mediating role of digital financial literacy and the moderating influence of perceived regulatory support. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 108. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030108>
- Bansal, D., & Kaur, L. (2024). Financial literacy and gender gap: a study of Punjab state of India. *Journal of Social and Economic Development*, 26(1), 77–101. <https://doi.org/10.1007/s40847-023-00253-0>
- BPK RI. (2020). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/154566/perpres-no-114-tahun-2020>
- Edquist, C. (2015). *Innovation-related Public Procurement as a Demand-oriented Innovation Policy Instrument*. ProQuest. <https://www.proquest.com/working-papers/innovation-related-public-procurement-asdemand/docview/1767747111/se-2?accountid=63730>
- Horobet, A., Dalu, M. A., Marinescu, I., Belascu, L., Dumitrescu, S. A., & Kostakis, I. (2025). Financial inclusion, technology, and income inequality in Europe. *Amfiteatru Economic*, 27(68), 93–110.
- Ifa, F., & Darmawan, M. S. (2025). Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK). *Jurnal Good Governance*, 1–18.
- Jia, J., Jia, C., Zhang, X., Ren, P., Chen, M., & Xu, J. (2024). The impact of internet medical service on rural gender inequality in health opportunity: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 24(1), 3093. <https://doi.org/10.1186/s12889024-20575-w>
- Kuznicka-Blaszkowska, D., & Jablonski, M. (2024). Information on Gender Identity as Personal Data under EU and US Data Protection Models. *Bialostockie Studia Prawnicze*, 29(3), 207–220. <https://doi.org/10.15290/bsp.2024.29.03.11>
- Le Quoc, D. (2024). The relationship between digital financial inclusion, gender inequality, and economic growth: dynamics from financial development. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 4(4), 370–388. <https://doi.org/10.1108/jbsed-122023-0101>
- Leviastuti, A., Santika, T. D., & Prasetyo, I. (2023). Financial Literacy Education for Women: A Novel Approach based on Social Media Platform. *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 2(1), 42–54. <https://doi.org/10.31098/jsetp.v2i1.991>
- Li, Y., Sun, G., Gao, Q., & Cheng, C. (2023). Digital financial inclusion, financial efficiency and green innovation. *Sustainability*, 15(3), 1879. <https://doi.org/10.3390/su15031879>
- Mpofu, F. Y. (2024). Industry 4.0 in finance, digital financial services and digital financial inclusion in developing countries: Opportunities, challenges, and possible policy responses. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(2), 120–135. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15081>
- Nandy, A. (n.d.). *Gender Data : Grammar of gender and number*. 1–4.
- Otekunrin, A. O., Chinoda, T., & Matowanyika, K. (2021). The nexus between economic growth, financial development, financial inclusion and financial innovation in Africa. *Asian Economic and Social Society*. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEFR.2021.118.672.681>
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2007). Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten. *PTKPNF Depdiknas*.
- Richards, N., Pandolfelli, L., Bouziani, B., Ofosu-Baadu, B., & Carter, K. (2022). The role of administrative data in gender statistics: Supporting inclusive development for women and girls. *Journal of International Development*, 34(2), 349–378. <https://doi.org/10.1002/jid.3600>
- Sun, H., Luo, Y., Liu, J., & Bhuiyan, M. A. (2024). Digital inclusive finance, R&D investment, and green technology innovation nexus. *Plos One*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297264>

- Sun, J., & Zhang, J. (2024). Digital financial inclusion and innovation of MSMEs. *Sustainability*, 16(4), 1404. <https://doi.org/10.3390/su16041404>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14–31.
- Waldman, A. E. (2023). Gender data in the automated administrative state. *Columbia Law Review*, 123(8), 2249–2320. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4358437>
- Waldman, A. E. (2024). Opening the gender box: Legibility dilemmas and gender data collection on US state government forms. *Law & Social Inquiry*, 49(4), 2021–2051. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.44>
- Wani, I. U., Alharthi, M., Khanday, I. N., Subhan, M., & Al-Faryan, M. A. S. (2024). Exploring the complementary interaction between financial inclusion and gender equality on economic growth: fresh evidence from developing countries. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2365585. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2365585>
- Yang, Y., Shi, S., & Wu, J. (2022). Digital financial inclusion to corporation value: The mediating effect of ambidextrous innovation. *Sustainability*, 14(24), 16621. <https://doi.org/10.3390/su142416621>

BIOGRAPHIES OF AUTHORS

	<p>Fauziatul Ifa     Pendidikan D1 Kebendaharaan Negara Politeknik STAN, S1 Politeknik STIA LAN Jakarta, S2 Politeknik STIA LAN Jakarta, Umur 28 Tahun. Bidang minat penelitian meliputi pertumbuhan ekonomi, keuangan inklusi, dan pertanian. ID Google Scholar: fauziatul ifa. Email: fauziatulifa4@gmail.com</p>
	<p>Luthfi Sabda Sahdana     D3 Akuntansi Politeknik STAN, 51 Akuntansi Universitas Trisakti. Bidang penelitian meliputi pertumbuhan ekonomi, kerjasama ekonomi internasional, dan akuntansi. Email: luthfisabda@gmail.com</p>